

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK
YANG MELAKUKAN PENGEDARAN NARKOTIKA DALAM
PERKARA PIDANA DI MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

MUH. ALWI HIDAYAT

NIM : 10500112091

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar”**, ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Makassar, 30 Maret 2017

Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
Muh. Alwi Hidayat

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar**”, yang disusun oleh saudara Muh. Alwi Hidayat, NIM: 10500112091, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2017, bertepatan dengan 9 Rajab 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 April 2017
9 Rajab 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag
Munaqisy I : Dr. Andi Safriani , M.H
Munaqisy II : Azhar Sinilele, S.H, M.H
Pembimbing I : Dr. Jumadi, M.H
Pembimbing II : Dr. Hamsir, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

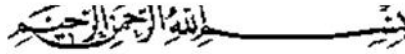
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat ke jalan Dineul Islam. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di jenjang perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu serta Saudara-Saudaraku yang saya hormati dan saya sayangi. Bapakku Drs. Alimuddin, dan Ibuku Sitti Hatijah, S.Pd tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau

semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Jumadi, SH.,MH., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Hamsir,SH.,M.Hum, selaku dosen pmbimbing II skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin.
5. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Amin.
7. Bapak Hakim dan Pegawai Bagian Kemahasiswaan Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak Suparman Nyompa., SH, MH selaku hakim narasumber penelitian saya dan Bapak Mustari., SH selaku Pegawai Bagian Kemahasiswaan yang telah memberikan fasilitas waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil.
8. The Kalomang’s sebagai perkumpulan orang-orang terpilih, Syamsul Rijal S.H. Munawir Abdul Kamal S.H., Ahmad Subhan Suaib S.H., Dinul Pradana

S.H., yang telah memberikan dukungan moral, kesan, dan semangat persahabatan kepada penulis.

9. Semua teman-temanku pada Ilmu Hukum, Khususnya Ilmu Hukum 2012 yang saya sayangi dan saya cintai yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu.
10. Teman-teman KKN Reguler, khususnya teman-teman KKN Reguler angkatan 51 yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
11. Terkhusus buat Andi Tenri Ajeng S.H yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 30 Maret 2017
Penulis,

Muh. Alwi Hidayat

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
ABSTRAK	ix-x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14-28
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak	20
C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29-32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33-64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana di Makassar	
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Di Kota Makassar	59
C. Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar Dalam Putusan Perkara Nomor : 144/Pid.Sus.anak/2016/PN.Mks	61
BAB V PENUTUP.....	65-66
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	67-68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

ABSTRAK

Nama : Muh. Alwi Hidayat

NIM : 10500112091

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan Pengedaran narkotika di Makassar. yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan pengedaran Narkotika dalam perkara pidana di Makassar ?, 2) Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap korban anak yang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks ?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 114 Pid.Sus.anak/2016/PN.Mks dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi, wawancara, dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam kasus ini sudah tepat dengan memberikan hak untuk di dampingi Kuasa Hukum serta diberikan Hak nya dengan pendampingan wali atau orang terdekat oleh terdakwa serta di perlakukan sebagaimana diatur dalam sistem Peradilan Anak . Pada saat dilangsungkannya persidangan pun hakim tidak menggunakan atribut hakim dimana hakim yang melakukan persidangan hanya satu orang di dalam ruang sidang yang tertutup untuk umum dan hakim memperlakukan anak dalam sidang dengan rileks sehingga anak tidak tertekan. 2) Penerapan Sanksi Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar Dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks Implikasi dari penelitian ini adalah dalam meminimalisir terjadinya peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak maka dimulai dari peran keluarga , keluarga wajib menanamkan nilai-nilai kebaikan luhur dalam diri anak sehingga anak mampu memilah perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu jika anak sudah mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan luhur dari

dalam diri pasti hal ini dapat dihindari. Selain itu keluarga juga harus berperan aktif dan wajib memantau lingkungan pergaulan anak agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri anak sendiri ataupun orang lain apalagi jika sampai terjadi tindak pidana dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan agar terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dan bukan atas kekuasaan belaka. Dengan ketentuan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi logis dimana setiap orang tanpa terkecuali harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik orang itu dewasa maupun anak-anak.

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang sedang mengalami perkembangan dan kemajuan di segala aspek kehidupan. Sebagai Negara yang berkembang maka akan timbul dampak positif dan negatif terhadap masyarakatnya, dimana dampak positif tersebut dapat di lihat dengan pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta dampak negatifnya adalah antara lain semakin meningkatkan krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya tingkat kriminalitas terjadi di masyarakat tidak terkecuali terhadap kehidupan hukum yang terjadi di masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Berbicara tentang anak memang suatu hal yang menarik untuk dibahas. Tentulah yang harus dipahami pertama kali bahwa anak adalah manusia yang muda dan bahkan masih sangat muda dengan status dan keadaan moral tertentu. Banyak hal yang menyangkut anak yang terkadang membuat kita berpikir bahwa anak pada dasarnya berbeda dengan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki kemampuan akal berfikir sempurna dengan kehendak bebas yang dihormati oleh hukum.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja seringkali akhirnya menjurus pada perbuatan criminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi hal yang utama.²

Penegakan hukum perlindungan anak khususnya, terkait di dalamnya masalah sosial politik kesejahteraan anak yang berlaku atau diberlakukan pada

¹Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), h. 1.

²Susi Pangaribuan, *Sistem Pemidanaan Minimal Bagi Anak dalam Perkara Narkotika* (Jakarta: Varia Peradilan, 2012), h. 50.

suatu masyarakat atau negara tertentu, dan kondisi kultural masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Kepentingan terbaik anak menjadi filosofi pokok yang harus dipegang dan diperhatikan secara sungguh- sungguh. Hal ini tentunya semata- mata untuk memperoleh keadilan karena di satu sisi, untuk anak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di beberapa pasalnya seperti pasal 111, pasal 112 dan pasal 114, seorang Hakim terbentur kepada ketentuan minimum pidana khusus, sementara dilain sisi Hakim juga dituntut harus menjadi Hakim yang bijak dan progresif dengan kerangka dan payung hukum yang ada untuk memberikan pemenuhan sisi kepentingan terbaik anak.³

Hal inilah yang tentu akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam praktiknya khususnya terhadap penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut dari praktik yang ada selama ini, hampir dapat dipastikan bahwa Hakim akan menjatuhkan pidana dalam putusan yang mana pidanaannya lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan.⁴

Undang-undang yang hingga kini masih berlaku tersebut belum mengatur bagaimana dengan ancaman minimum yang saat ini banyak diatur dalam undang-undang yang memuat delik-delik yang memuat ancaman pidana minimum yang mungkin dilakukan oleh anak misalnya narkoba, pornografi, tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, kejahatan dalam UU Perlindungan Anak dan beberapa tindak pidana lainnya. tetapi terlepas dari jenis delik apa yang mungkin dilakukan oleh anak dibawah umur pertanyaan mengenai bagaimana pemberlakuan ancaman

³Susi Pangaribuan, *Sistem Pidana Minimal Bagi Anak dalam Perkara Narkoba* (Jakarta: Varia Peradilan, 2012), h. 56.

⁴Sujono & Bon Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 217.

pidana minimum bagi anak tetaplah penting untuk dijawab karena jangan sampai pidana minimum khusus yang dirumuskan justru mencederai rasa keadilan dalam hubungannya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dengan pasal terkait pidana minimal khusus karena kepentingan terbaik anak merupakan filosofi keadilan yang harus dicapai dalam penanganan perkara yang terdakwaanya adalah anak.⁵

Anak sebagai pelaku korban atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian kita semua. Berdasarkan “Deklarasi Hak Anak” oleh majelis umum PBB, yang di sahkan pada tanggal 20 November 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak. Anak adalah potensi yang dimiliki suatu bangsa yang memiliki peranan penting sebagai salah satu sumbu daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa dan memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Sehingga berdasarkan peranan dan karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh anak itulah maka perlakuan terhadap anak yang berhubungan dengan masalah sosial ataupun masalah hukum perlu diperhatikan demi kesejahteraan anak.

Perangkat hukum yang mengatur tentang anak tersebut antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang pengadilan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Sedangkan azas perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah berdasarkan prinsip pokok yang terkandung dalam konfrensi hak-hak yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, di dasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak,

⁵Sujono & Bon Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 217.

memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang hakikatnya perlu perlindungan hukum yang tepat, baik itu ketentuan hukum pidana materiil maupun ketentuan formil. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, ketentuan jenis sanksi pidana terhadap anak menggunakan ketentuan pasal 10 KUHP dengan pembatasan yang ditentukan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah di atur tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud yang bersifat khusus kepada anak

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Kesalahan, pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal anak maupun faktor dari luar atau lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih sebatas kenalan tapi tidak menutup kemungkinan karena pengaruh pergaulan dan semakin cepat

perkembangan disegala sector kehidupan menimbulkan perilaku anak yang dapat digolongkan sebagai kejahatan sehingga sering dijumpai anak yang terlibat kasus narkoba dan bahkan ada yang melakukan pembunuhan.

Data dari BNK Makassar yang disadur dari satuan reserse narkoba, sebanyak 155 kasus narkoba pada tahun 2012. Meningkat lagi sebanyak 169 kasus pada tahun 2014. Hingga februari 2015, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 32 kasus. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁶

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Kathoda, 2005), h. 66.

Peredaran obat (Narkotika) Indonesia merupakan suatu hal yang sangat merisaukan, mengingat anak adalah generasi yang menjadi harapan bangsa. Ancaman bahaya peredaran Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tersebut dapat menjadi “kerikil tajam” bagi kelancaran pembangunan. Khususnya pembangunan sumber daya manusia khususnya perlu ditanggulangi secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.⁷

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut

⁷Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 17.

Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Pada kenyataannya, tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁸

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang

⁸www.kompas.com, diakses tanggal 11 september 2012 pukul 14:45 WITA.

menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.

Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Di Makassar pun demikian, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang korbannya adalah anak semakin banyak terjadi. Yang mengherankan adalah meskipun pihak yang berwajib telah banyak menangkap pengedar narkoba dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkoba seperti BNN dan Granat yang telah melakukan berbagai tindakan pre-emptif dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, masih tetap saja kasus penyalahgunaan narkoba menjamur di masyarakat. Rasa heran penulis kemudian berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran penulis tentang merebaknya kasus penyalahgunaan dan narkoba khususnya anak sebagai korban.⁹

⁹Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Terhadap Penggunaan Narkoba Oleh Anak* (Malang: Umm Press, 2005), h.3.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Dalam Kasus Pengedaran Narkotika di Kota Makassar*”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Korban Anak Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana di Makassar”. Untuk memberikan arah yang tepat berdasarkan terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Hukum adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, hukum bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi.¹¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, disuntik, intravena dan lain sebagainya.¹³

¹⁰Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹¹<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-hukum/html>.diakses.pada pukul 07.00 WITA 16 Juni 2015.

¹²Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹³<http://documents.tips/documents/pengetahuan-narkoba-menurut-para-ahli.html>.

Dengan demikian, dari pengertian kata-kata yang telah diberikan seperti diatas yang berkaitan seperti diatas dengan judul skripsi ini, pembaca diharap dapat lebih mengetahui arah yang jelas/tepat terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan pengedaran Narkotika dalam perkara pidana di Makassar ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap korban anak yang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi di butuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian . Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memilih relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Andi Winarni dengan judul “ Tinjauan Viktimologis Terhadap penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Makassar” skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peranan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan bagaimana perlindungan atau bantuan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.¹⁴

¹⁴Andi Winarni, “ *Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Makassar*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , 2013.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengedaran narkotika dalam perkara pidana di Makassar.
- b. Menjelaskan bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan perkara nomor : 114/Pid.Sus. Anak/2016/PN Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat mengenai perlindungan hukum korban anak yang melakukan pengedaran narkotika dalam kasus pengedaran di Kota Makassar. Serta kendala -kendala perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan pengedaran narkotika di Kota Makassar. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah

yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Dalam Kasus Pengedaran Narkotika Di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.¹

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 124.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia

²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 126.

adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

³ www.kompas.com, diakses tanggal 11 september 2012 pukul 14:55 WITA

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁴

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi

⁴UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009.

maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁵

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUH Perdata Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.⁶

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.⁷

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan

⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 130.

⁶I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet:Pertama (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), h. 57.

⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 132.

harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Pada setiap masyarakat manapun baik yang beraneka ragam corak kehidupannya maupun yang tidak, setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari kemungkinan menurunkan keturunan atau anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, karena seorang anak dianggap salah satu pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan keturunan adalah hubungan antara anak dengan orang tua, atau lebih dari itu antara disatu pihak para anak, dilain pihak para orang tua beserta para nenek moyang mereka.⁸

Memang dalam kehidupan yang nyata tujuan perkawinan tidak hanya untuk memperoleh keturunan, namun demikian tetap dikhawatirkan perkawinan akan mudah putus apabila tujuan tersebut tidak tercapai dalam arti tidak adanya yang lahir selama perkawinan berlangsung. Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian anak:

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian anak. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan

⁸H.F.A. Vollar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: CV: Rajawali, 1983), h. 121.

atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.

Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero : Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, berbicara mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum maka pembatasan umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yaitu pada Pasal 1 angka (1) dimana disebutkan bahwa : Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁹

Dalam Pasal 2 KUHPdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁰

Anak merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi Nusa dan Bangsa, memberikan perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang merupakan tanggungjawab kita bersama dalam kaitannya tanggungjawab anak itu sendiri dan sesuai dengan kemampuan pertanggung jawaban masing-masing.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.¹¹

Kemudian di dalam Hukum Adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero :

Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya kelak di

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 135.

¹¹Edukasi.kompasiana.com, diakses tanggal 11 September 2012, pukul 14:45 wita.

kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian anak:

a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana :

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata :

Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

¹²Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 173.

¹³Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

c. Pengertian anak menurut Hukum Islam :

Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini:

1. Telah berumur 15 (lima belas) tahun
2. Telah keluar air mani bagi laki-laki
3. Telah datang haid bagi perempuan

C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika

a. Pengertian peredaran

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia (Padmo Wahjono, 1987 : 208) pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.

Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

b. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur dibawah kendali medis yang untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang

haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.¹⁴

Dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan tidak hanya itu, kini nyata-nyata telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel-sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan Narkoba ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia.¹⁵

Jadi, pada hakekatnya Narkoba memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Positif, adalah demi kepentingan medis. Sedangkan negatif adalah untuk kepentingan bisnis ilegal oleh kalangan mafia yang tidak bertanggungjawab. Menghancurkan kehidupan manusia dan menjadi musuh bersama seluruh bangsa beradap di muka bumi ini. Terkait dengan ini maka perlunya membangun karakter manusia sebagai embrio karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan mampu memiliki daya imunitas yang lebih baik untuk menghadapi peredaran gelap Narkoba. Dengan daya tahan yang handal, maka pengaruh negatif Narkoba dapat dicegahnya.¹⁶

Jenis- Jenis Narkotika (Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif lainnya).

1. Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

¹⁴H.Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA* (Jakarta: FKUI, 2003), h. 12.

¹⁵Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Bangsa* (Jakarta: Forum Media Utama, 2010), h. 47.

¹⁶ H.Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA* (Jakarta: FKUI, 2003), h. 15.

- a. Golongan I (tidak digunakan dalam pengobatan hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis) contoh : Heroin, Kokain, EExtacy, Opium, Sabu-Sabu, Ganja.
- b. Golongan II (digunakan dalam pengobatan tapi terbatas, jumlahnya ada 86 jenis) contoh : Morfin, Petidina, Fentamil, Alfametadol, Alfentanil, Bezetidin, Alliprodina.
- c. Golongan III (digunakan dalam pengobatan, jumlahnya ada 13), contoh : Kodein, Polkodina, Dionima, Buprenorfina, Norkodeina, Etilmorfina, Propiram.¹⁷

2. Psikotropika.

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

a. Golongan I

Psikotropika golongan I ini memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, jumlahnya ada 26 jenis contoh : Psilosibin dan Psilosin yaitu zat yang diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico, dan Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus tumbuh di Amerika Barat.¹⁸

b. Golongan II

Psikotropika golongan II mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 60 contoh : Amphetamine, Metaqualon.

c. Golongan III

¹⁷Tiem Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba* (Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), h.53-54

¹⁸Agus Sutanto, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya* (Surabaya: Balai Penerbit BNPJawa Timur, 2007), h. 16-19

Psikotropika golongan III mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 9 contoh : Amobarbital, Flunitrazepam.

d. Golongan IV

Psikotropika golongan IV mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan jumlahnya ada 16, contoh: Diazepam, Klobazam, Nitrazepam.¹⁹

2. Zat Adiktif Lainnya.

Macam- macam zat adiktif yaitu :

a. Alkohol

Alkohol adalah hasil fermentasi/ peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, nira. Kadar alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak lebih dari 14%.

b. Kafein

Kafein adalah Alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1- 2,5% kafein.

c. Nikotine

Nikotine terdapat dalam tumbuhan tembakau dengan kadar sekitar 1-4%. Dalam setiap batang rokok terdapat 1,1 mg nikotine. Nikotine menimbulkan ketergantungan.

d. Zat Sedatif dan Hipnotika

¹⁹Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 26-28.

Yang tergolong zat sedatif (penenang) atau hipnotika diantaranya Benzondiazepin, Temazepam dan Diazepam.²⁰

D.Tinjauan umum tentang diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Ambition of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai yakni proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik.

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi atau diversi. Pelaksana dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

²⁰Wawan Ranuwijaya, *Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional tahun 2010), h. 10-12.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneltian yang dilakukan dilapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Panitera, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini serta Putusan Nomor : 114 Pid.Sus.anak/2016/PN.Mks.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji buku-buku terkait hukum perlindungan anak, narkoba, perlindungan hukum terhadap anak, situs-situs internet, terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar . Lokasi Penelitian ini dipilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kota makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di kota makassar. Di analisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan Kaedah-kaedah Hukum yang Relevan dengan masalah tersebut.

C. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.

2. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. pihak yang di maksud informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Panitera, dan pihak-pihak yang terkait lainnya.¹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.²

E. Instrumen Penelitian

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi dokumen.

¹Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet: V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58.

²Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 73.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam megolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut :

1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Dalam Kasus Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana di Makassar

1. Posisi Kasus

Pada awalnya di hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Muh. Arham, S.,H. dan saksi Suandi Yusran dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan Patroli di seputaran Jl. Urip Sumiharjo tiba-tiba terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin melintas dengan cepat dan ugal-ugalan sehingga saksi merasa curiga dan mencoba mengikutinya hingga terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin berhenti didepan sebuah rumah masih di Jl. Urip Sumiharjo tepatnya di daerah Tello Kota Makassar.

Setelah terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin berhenti, saksi Muh. Arham. S.,H. dan saksi Suandi Yusran juga berhenti lalu mendekati terdakwa sambil memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar serta menanyakan identitas terdakwa. Selanjutnya saksi Suandi Yusran memeriksa kantong celana terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin dan menemukan bungkusan sachet plastic kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram.

Pada saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik lel. Fikal (DPO Polrestabes Makassar) yang akan terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin antar ke rumah lel. Fikal yang berada di lokasi penangkapan terdakwa. Terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin hanya diminta oleh lel. Fikal

untuk mengantar shabu-shabu tersebut karena lel. Fikal akan ke rumah temannya. Terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh lel. Fikal dari ibu terdakwa yang bernama Salma (DPO Polrestabes Makassar) begitupun dengan sachet plastic kosong juga milik lel. Fikal.

Selanjutnya terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin, dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut, terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin masih berstatus pelajar SMP kelas 2 dan terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin tetap melakukannya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Primair :

Terdakwa ***Muh. Ikbal bin Saharuddin*** pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jl. Urip Sumiharjo - Tello Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 0,9698 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Muh. Arham, S.,H. dan saksi Suandi Yusran dari Satuan Reserse Narkoba

Polrestabes Makassar sementara melakukan Patroli di seputaran Jl. Urip Sumiharjo tiba-tiba terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin melintas dengan cepat dan ugal-ugalan sehingga saksi merasa curiga dan mencoba mengikutinya hingga terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin berhenti didepan sebuah rumah masih di Jl. Urip Sumiharjo tepatnya di daerah Tello Kota Makassar,

- Bahwa setelah terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin berhenti, saksi Muh. Arham. S.,H. dan saksi Suandi Yusran juga berhenti lalu mendekati terdakwa sambil memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar serta menanyakan identitas terdakwa,
- Selanjutnya saksi Suandi Yusran memeriksa kantong celana terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin dan menemukan bungkus sachet plastic kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram,
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik lel. Fikal (DPO Polrestabes Makassar) yang akan terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin antar ke rumah lel. Fikal yang berada di lokasi penangkapan terdakwa,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin hanya diminta oleh lel. Fikal untuk mengantar shabu-shabu tersebut karena lel. Fikal akan ke rumah temannya,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh lel. Fikal dari ibu terdakwa yang bernama Salma (DPO Polrestabes Makassar) begitupun dengan sachet plastic kosong juga milik lel. Fikal,

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin, dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin masih berstatus pelajar SMP kelas 2,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka terdakwa Muh. Ikbil bin Saharuddin tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ditemukan :
 “Barang bukti Kristal bening milik Muh. Ikbil bin Saharuddin, tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

b. Subsidair :

Terdakwa **Muh. Ikbil bin Saharuddin** pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jl. Urip Sumiharjo - Tello Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat keseluruhan 0,9698 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin tertangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jl. Urip Sumiharjo Kota Makassar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan bungkus sachet plastic kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram,
- Bahwa Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik lel. Fikal (DPO Polrestabes Makassar) yang akan terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin antar ke rumah lel. Fikal yang berada di lokasi penangkapan terdakwa,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh lel. Fikal dari ibu terdakwa yang bernama Salma (DPO Polrestabes Makassar) begitupun dengan sachet plastic kosong juga milik lel. Fikal,
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin, dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin masih berstatus pelajar SMP kelas 2,
- Bahwa terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang

menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka terdakwa Muh. Ikbal bin Saharuddin tetap melakukannya,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, ditemukan :

“Barang bukti Kristal bening milik Muh. Ikbal bin Saharuddin, tersebut adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2016, Nomor Reg. Perkara PDM-31/Mks/Ep./04/2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **Muh. Ikbal bin Saharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **Muh. Ikbal bin Saharuddin** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Muh. Ikbil bin Saharuddin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan Pelatihan Kerja di Depsos selama 3 (tiga) Bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa .
 - a) 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan **0,9698 gram.**
 - b) 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sachet plastic kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu :

Menimbang, bahwa Anak tersebut didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERK. : PDM 31/Mks/Euh.2/04/2016 tanggal 15 April 2016, sebagai berikut : Ke satu :

Bahwa ia Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Urip Sumiharjo - Tello, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hal atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 0,9698 gram, perbuatan mana Terdakwa lakukar dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar puku 14.00 WITA, Saksi MUH. ARHAM, SH. dan Saksi SUANDI YUSRAN dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli di seputaran Jalan Urip Sumiharjo tiba-tiba Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN melintas dengan cepat dan ugal-ugalan sehingga Saksi merasa curiga dan mencoba mengikutinya hingga Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN berhenti di depan sebuah rumah masih di Jalan Urip Sumiharjo tepatnya di daerah Tello Kota Makassar.
- Bahwa setelah Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN berhenti, Saksi MUH. ARHAM, SH. dan Saksi SUANDI YUSRAN juga berhenti lalu mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar serta menanyakan identitas Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi SUANDI YUSRAN memeriksa kantong celana Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN dan menemukan bungkusan sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram.
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. FIKAL (DPO Polrestabes Makassar) yang akan Terdakwa MUH.

IKBAL bin SAHARUDDIN antar ke rumah Lel. FIKAL yang berada di lokasi penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN hanya diminta oleh Lel. FIKAL untuk mengantar shabu-shabu tersebut karena Lel. FIKAL akan ke rumah temannya.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN hanya menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Lel. FIKAL dari ibu Terdakwa yang bernama SALMA (DPO Polrestabes Makassar) begitupun dengan sachet plastik kosong juga milik Lel. FIKAL.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN masih berstatus pelajar SMP kelas 2.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Makassar, ditemukan : "Barang bukti kristal bening milik MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke dua :

Bahwa ia Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Urip Sumiharjo - Tello, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 0,9698 gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN tertangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan bungkus sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram.

- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. FIKAL (DPO Polrestabes Makassar) yang akan Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN antar ke rumah Lel. FIKAL yang berada di lokasi penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Lel. FIKAL dari ibu Terdakwa yang bernama SALMA (DPO Polrestabes Makasar) begitupun dengan sachet plastik kosong juga milik Lel. FIKAL.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN masih berstatus pelajar SMP kelas 2.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN mengetahui kalau memiliki, menyimpan maupun menggunakan shabu-shabu dilarang namun karena yang menyuruh adalah teman ibunya dan ibunya juga tidak keberatan maka Terdakwa MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman, Tim yang memeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Foreksik POLRI Cabang Makassar, ditemukan : "Barang bukti kristal bening milik MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis dengan berat keseluruhan 0,9517 (nol koma sembilan ribu lima ratus tujuh belas) gram yang merupakan sisa dari barang bukti nomor label 3535/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sachet plastik kosong, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

Ke satu : Melanggar Pasal 114 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ke dua : Melanggar Pasal 112 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar felt* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar felt* itu adalah :

- 1) apakah terbukti bahwa felt telah diwujudkan oleh Anak;
- 2) kalau demikian, strafbaar felt mana yang telah diwujudkannya;
- 3) jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Anak tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- 4) kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Anak harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1319/NNF/IV/2016 tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Anak, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Anak, dan dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan Anak, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan dikuatkan dengan adanya barang bukti, telah terbukti fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia. "dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Anak ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar. Saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Anak ditemukan bungkusan sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) gram. Saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut, Anak menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. FIKAL (DPO Polrestabes Makassar) yang akan Anak antar ke rumah Lel. FIKAL yang berada di lokasi penangkapan Anak. Anak juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Lel. FIKAL dari ibu Anak yang bernama SALMA (DPO Polrestabes Makasar) begitupun dengan sachet plastik kosong juga milik Lel. FIKAL;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan, bahwa perbuatan Anak tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut. berdasarkan asas Logische Speciaaiiteit, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa karena Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak tersebut terjadi ketika mereka belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Anak tersebut masih termasuk kategori Anak, dan dalam mengadili Anak tersebut berlaku ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman":

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Anak ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar. Saat dilakukan penggeledahan pada kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Anak ditemukan bungkusan sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) gram. Atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) gram. berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut. Anak menerangkan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lel. FIKAL (DPO Polrestabes Makassar) yang akan Anak antar ke rumah Lel. FIKAL yang berada di lokasi penangkapan Anak. Anak juga menerangkan kalau shabu-shabu tersebut diperoleh Lel. FIKAL dari ibu Anak yang bernama SALMA (DPO Polrestabes Makasar) begitupun dengan sachet plastik kosong juga milik Lel. FIKAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ke tiga "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Anak melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan

melawan hukum", sehingga unsur ke dua ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan. Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya Hakim Anak berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka substansi nota pembelaan Penasehat Hukum, khususnya dalam merangkai analisa fakta-fakta persidangan dan analisa yuridis yang tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam perkara ini, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat

dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (*vide Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak telah memohon, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringen-ringannya;

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (*vide Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*). Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat (*vide Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak. bagi orang dewasa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), namun untuk pelaku seorang Anak hanya dapat dijatuhkan 1/2 (setengah) nya saja;

Menimbang, bahwa telah pula diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan

"Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa karena umur Anak sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan Anak adalah "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", maka keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, sehingga adalah tepat bilamana terhadap Anak tersebut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*), ketentuan tersebut berlaku pula dalam pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim Anak terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering jauh jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di slam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Anak sementara masa penahanan terhadap Anak masih ada, maka harus diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 71 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 193 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan Hakim

Mengingat Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 71 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 193 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

- Menyatakan Anak MUH. IKBAL bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” dalam dakwaan alternative ke dua.
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan Pelatihan Kerja di Lembaga yang ditunjuk Departemen Sosial selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) sachet plastic yang berisi kristal bening jenis dengan berat keseluruhan 0,9517 (nol koma Sembilan ribu lima ratus tujuh belas) gram yang merupakan sisa dari barang bukti nomor label 3535/2016/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 (nol koma Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan) gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sachet plastic kosong, dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut diatas terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu, primair: didakwa dengan pasal

114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua, subsidiar: didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum didalam dakwaannya telah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika berdasarkan barang bukti yang ditemukan di TKP Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram milik Muh. Ikbal bin Saharuddin, tersebut adalah benar Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan pada putusan akhir Majelis Hakim sudah tepat, dimana terdakwa dalam hal ini Muh. Ikbal bin Saharuddin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, kepemilikan narkotika yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan terdakwa dan penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan Pelatihan Kerja di Lembaga yang ditunjuk Departemen Sosial selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa masih dibawah

umur atau termasuk kategori anak-anak sehingga di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut “Suparman Nyompa. SH., MH.” Hakim Pengadilan Negeri Makassar, ketika tersangka pengedaran narkotika adalah kategori anak atau belum cukup umur maka anak wajib didampingi wali dan penasehat hukum, pada saat dilangsungkannya persidangan hakim tidak menggunakan atribut hakim dimana hakim yang melakukan persidangan hanya satu orang di dalam ruang sidang yang tertutup untuk umum dan hakim memperlakukan anak dalam sidang dengan rileks sehingga anak tidak tertekan serta memperoleh pendampingan dari orang yang dipercayai anak tersebut. Dalam hal sanksi yang diberikan kepada anak dimana anak diberikan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh kementrian sosial republik Indonesia yaitu yayasan kelompok peduli penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (YKP2N) dan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan akan membahayakan masyarakat.

Perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Adapun prosedur pemeriksaan perkara Anak dimuka sidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Disidangkan oleh hakim anak

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Anak).

2. Pengangkatan hakim anak oleh Ketua.

Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa tersebut yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. . Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak di pakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan dapat berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

3. Disidangkan dengan hakim tunggal

4. Menurut bapak Suparman Nyompa.SH.,MH Dalam menjatuhkan hukuman bagi anak- anak kita perlu melihat latar belakang dari anak yang bersangkutan baik mengenai pendidikan, keluarga, masyarakat maupun pergaulannya sehingga kita bisa mengambil keputusan dari berbagai pertimbangan seperti

laporan dari Lembaga pemasyarakatan dan mempertimbangkan segala hal spesifik dengan memperhatikan moral dan fisik anak yang bersangkutan.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar Dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks

Dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu, primair: didakwa dengan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua, subsidair: didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika berdasarkan barang bukti yang ditemukan di TKP Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram milik Muh. Ikbal bin Saharuddin, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya pada putusan maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang mempunyai pertanggungjawaban pidana, dalam perkara ini adalah mereka Terdakwa **Muh. Ikbal bin Saharuddin** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, unsur tanpa hak sebagaimana dalam ketentuan UU No.35 tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan. Selain itu yang berhak menyimpan narkotika untuk kepentingan tersebut adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin dan wajib disimpan secara khusus.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa **Muh. Ikbal bin Saharuddin** telah tertangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes

Makassar dan pada saku celananya ditemukan bungkus sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan **0,9698 gram**, sementara terdakwa hanyalah seorang pelajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) kelas 2 dan tidak berprofesi sebagai peneliti, dokter atau ahli laboratorium dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan dan atau Ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari yang berwenang.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terdaftar dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa **Muh. Ikbal bin Saharuddin** telah tertangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tertangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Tello Jl. Urip Sumiharjo Kota Makassar dan pada saku celananya ditemukan bungkus sachet plastik kosong dan 2 (dua) sachet plastic yang berisi Kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,9698 gram,.

Sehingga pada putusan akhir Majelist, dimana terdakwa dalam hal ini Muh. Ikbal bin Saharuddin dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, kepemilikan narkotika yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan terdakwa dan penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a

decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan serta beberapa pertimbangan majelis hakim yang telah diuraikan di atas, untuk itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan Pelatihan Kerja di Lembaga yang ditunjuk Departemen Sosial selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa masih dibawah umur atau termasuk kategori anak-anak sehingga di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menurut penulis, Penjatuhan putusan dengan hukuman penjara selama 1(satu) dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh Hakim kurang tepat karena hal ini dapat memberikan efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatnnya dalam sistem peradilan. Harusnya penjatuhan pidana merupakan upaya hukum terakhir. Menurut UU. No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang yang menjadi pengedar atau kurir narkoba lewat pendekatan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika Dalam Perkara Pidana Di Makassar yaitu : Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam kasus ini sudah tepat dengan memberikan hak untuk di dampingi Kuasa Hukum serta diberikan Hak nya dengan pendampingan wali atau orang terdekat oleh terdakwa serta di perlakukan sebagaimana diatur dalam sistem Peradilan Anak .
2. Penerapan Sanksi Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar Dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid. Sus.anak/2016/PN. Mks yaitu Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).LPKA ini terpisah dari lembaga pemasyarakatan (biasa disebut dengan) penjara orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah yang terdapat LPKA, Anak ditempatkan terpisah dari penjara orang dewasa agar dapat terhindar dari pengaruh buruk selama di penjara. Jaksa Penuntut

Umum tidak serta merta memposisikan anak seperti halnya orang dewasa dalam hal kasus pidana.

B. Implikasi Penelitian

Menurut penulis, Penjatuhan putusan dengan hukuman penjara selama 1(satu) dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh Hakim kurang tepat karena hal ini dapat memberikan efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan. Harusnya penjatuhan pidana merupakan upaya hukum terakhir. Menurut UU. No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi pengedar atau kurir narkoba lewat pendekatan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi

Dalam meminimalisir terjadinya peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak maka dimulai dari peran keluarga, keluarga wajib menanamkan nilai-nilai kebaikan luhur dalam diri anak sehingga anak mampu memilah perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu jika anak sudah mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan luhur dari dalam diri pasti hal ini dapat dihindari. Selain itu keluarga juga harus berperan aktif dan wajib memantau lingkungan pergaulan anak agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri anak sendiri ataupun orang lain apalagi jika sampai terjadi tindak pidana dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan agar terdakwa yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno. 2005. *Diversi Sebagai Upaya Alternatife Penanggulangan Terhadap Penggunaan Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press.
- Ahli, Tiem. 2009. *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional.
- Daniel, Bon & Sujono. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedoktterrann Universitas Indonesia.
- Hawari, H. Dadang. 2003. *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*. Jakarta: FKUI.
- Kadarmanta, 2010. *Narkoba Pembunuh Bangsa*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Kathoda, 2005), h. 66.
- Makaraao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Pangaribuan, Susi. 2012. *Sistem Pemidanaan Minimal Bagi Anak dalam Perkara Narkotika*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranuwijaya, Wawan. 2010. *Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KitabUndang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang PidanaIndonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Setiady, Tolib. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, Agus. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Surabaya: Balai Penerbit BNPI Jawa Timur.

Usman. dkk, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Cet: V. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Vollar, H.F.A. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: CV: Rajawali.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet:Pertama*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

B. Internet

Edukasi.kompasiana.com, diakses tanggal 11 September 2012, pukul 14:45 wita.

<http://documents.tips/documents/pengetahuan-narkoba-menurut-para-ahli.html>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertianhukum/html>.diakses.pada

pul 07.00 WITA 16 Juni 2015.

www.kompas.com, diakses tanggal 11 september 2012 pukul 14:45 WITA.

www.kompas.com, diakses tanggal 11 september 2012 pukul 14:55 WITA.

C. Skripsi

Andi Winarni, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Makassar*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , 2013.

D. Undang-undang

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 510 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Jumadi., SH., MHI
2. Dr. Hamsir., SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

- Nama : Muh. Alwi Hidayat
- N I M : 10500112091
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar"
- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

ada tanggal : 17 Oktober 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/2016
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi
An. Muh. Alwi Hidayat/10500112091

Kepada Yth;

1. **Dr. Jumadi, SH.,MH**

Sebagai Pembimbing I.

2. **Dr. Hamsir, SH.,M.Hum**

Sebagai Pembimbing II.

Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri **Seminar** dan melaksanakan serta bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016

Waktu : 09.30 WITA - selesai

Tempat/Ruangan : Jurusan ilmu hukum

Judul Skripsi : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika di kota Makassar** ”

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 20 Oktober 2016

Wassalam,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Istiqamah, SH.,MH.

NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa. Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SL.1/PP.00.9/2176/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 10 November 2016

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh. Alwi Hidayat
N I M : 10500112091
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmui Hukum
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Dato Gaffa Mangalli

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Yang Melakukan Pengedaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Perkara nomor : 114/Pid. Sus. Anak/2016/PN.Mks”

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Jumadi, SH.,MH**
2. **Dr. Hamsir, SH.,M.Hum**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 11 November 2016 s/d 11 Desember 2016

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 22 Nopember 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 340 /HKM/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUH. ALWI HIDAYAT
NIM : 10500112091
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Dato Gaffa Mangalli Gowa
Judul Penelitian : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK
YANG MELAKUKAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR
: 114/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MKS".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar,
sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016, dan
telah dibimbing oleh : M A K A S S A R

1. SUPARMAN NYOMPA, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan
dari Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : SI.1/PP.00.9/2176/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA

BASO RASYID, SH.,MH
NIP.196112101982031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara, MUH ALWI HIDAYAT, NIM 10500112091, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK YANG MELAKUKAN PENGEDARAN NARKOTIKA PERKARA PIDANA DI MAKASSAR DALAM PUTUSAN NOMOR: PID.SUS.ANAK/2016/PN./MKS, memadamang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 29 Maret 2017

Pembimbing I

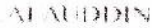


Dr. JUMADI, SH., MH
NIP: 19630204 199403 1003

Pembimbing II



Dr. HAMSIR, SH., M. Hum
NIP: 19640601 199303 1002



Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Tembususan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata -- Gowa:



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 1523/SL.1/PP.00.9/3../2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 31 Maret 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
 3. Dr. Andi Safriani, M.H (Penguji I)
 4. Azhar Sinilele, S.H, M.M, M.H (Penguji II)
 5. Dr. Jumadi, M.H (Pembimbing I)
 6. Dr. Hamsir, M.Hum (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Alwi Hidayat

NIM : 10500112091

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 April 2017

Waktu : Pukul 14.00-15.00 Wita

Tempat : Ruang 107

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. 2
NIP. 19621016 199003 1 003


DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER1.0..... (.....) WISUDA PERIODE
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : Muh. Arwi Hidayat
NIM : 10800112041
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap korban anak yang melakukan pengedaran narkoba dalam perkara pidana di Makassar

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3,5	3	10,5	3,5

Samata,

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan


MUJAHIDAH, S.E
NIP. 19670309 199303 2 002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 36 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Muh. Alwi Hidayat
N I M : 10500112091
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak yang Melakukan Pengedaran Narkotika dalam Perkara Pidana di Makassar"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Penguji I : Dr. Andi Safriani, M.H
Penguji II : Azhar Sinilele, S.H, M.H
1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ujian Munaqasyah/Skripsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 4 April 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 1524/SL.1/PP.00.9/4./2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 4 April 2017

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (Sekertaris)
3. Dr. Andi Safriani, M.H (Penguji I)
4. Azhar Sinilele, S. H. M.M, M.H (Penguji II)
5. Dr. Jumdi, M.H (Pembimbing I)
6. Dr. Hamsir, M.Hum (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muh. Alwi Hidayat

N I M : 10500112091

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Alwi Hidayat, lahir di Sungguminasa pada tanggal 10 Juli 1994 dari pasangan suami istri Drs. Alimuddin dan St. Hatijah. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pertama kali melangkah kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2000 di SDN Centre Mangalli 2000-2006. Kemudian melanjutkan ke tingkat SMPN 1 Pallanga tahun 2006-2009. Kemudian penyusun melanjutkan pendidikan ke SMA 1 Pallangga pada tahun 2009-2012. Kemudian setelah tamat, penyusun memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu dengan memilih jurusan Ilmu Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum terhitung mulai tahun 2012-2017.

